

BAB I



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bangsa Indonesia merupakan sebuah negara majemuk yang di dalamnya terdapat keanekaragaman suku, budaya, sejarah, bahasa, agama dan sebagainya. Keanekaragaman tersebut disatukan oleh dasar negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila adalah substansi perekat bangsa.¹ Semboyan Pancasila “Bhinneka Tunggal Ika” yang berarti “Berbeda-beda tetapi tetap satu Juga” menunjukkan akan substansi perekat bangsa yang ingin dicapai oleh negara Indonesia.

Tujuan lahirnya Pancasila adalah untuk membangun kebaikan bagi rakyatnya. Dengan berlandaskan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, negara Indonesia berusaha mewujudkan negara kesatuan dalam keanekaragaman dengan berlandaskan sistem demokrasi. Seturut dengan sistem pemerintahan demokrasi, tujuan negara yang sudah ditetapkan harus berlandaskan pada kepentingan rakyat.

¹ Bangsa Indonesia dapat betahan, kuat, dan utuh apabila diikat oleh unsur-unsur yang homogen. Dalam pengertian filsafat unsur-unsur homogen yang mengikat dan merekatkan sesuatu yang menjadi bagian dari kesatuan disebut sebagai substansi. Singkatnya, substansi adalah unsur dasar yang menentukan sifat suatu hal tertentu sehingga sesuatu itu tetap ada secara objektif dan permanen dan membedakan sesuatu dengan yang lain. (Bdk. Andreas Doweng Bolo, dkk., *Pancasila Kekuatan Pembebasan*, Yogyakarta: Kanisius, 2012, 31)

Oleh karena keanekaragaman itu, negara harus menjamin terciptanya keamanan, keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan kemerdekaan bagi rakyatnya. Selain itu, negara juga hendaknya melindungi hak milik setiap warga negara.²

Akan tetapi dalam kemajemukan tersebut, rakyat Indonesia masih sering mengalami banyak sekali permasalahan dalam memahami akan pengertian dari toleransi. Kesalahpahaman dalam memahami pengertian dari toleransi ini mengakibatkan timbulnya suatu konflik dalam masyarakat. Toleransi yang seharusnya dipandang sebagai suatu bentuk penghormatan akan martabat kemanusiaan, justru digunakan sebagai sarana untuk melanggengkan ketidakadilan kepada sesamanya. Akibatnya pun, toleransi yang dijalankan malah mengakibatkan konflik berlandaskan kepentingan pribadi maupun kelompok.

Fenomena yang dapat penulis tunjukkan untuk membuktikan bahwa masih rendahnya pemahaman masyarakat akan pengertian dari toleransi, yakni peristiwa yang terjadi di Yogyakarta pada tanggal 2 April 2019. Slamet Jumiarto, seorang pelukis di Yogyakarta ditolak mengontrak di Dusun Karet, Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Alasan warga menolak Slamet mengontrak di daerah tersebut karena ia merupakan

² Bdk. Drs. Sukarna, *Kekuasaan Kediktatoran dan Demokrasi*, Bandung: Alumni, 1981, hlm 16-17.

seorang penganut agama Katolik. Penolakan tersebut berdasarkan peraturan yang dikeluarkan pada tahun 2015.³

Peraturan tersebut berisikan aturan yang melarang pendatang dari kalangan non muslim dan aliran kepercayaan. Aturan tersebut dikeluarkan oleh Lembaga Permasayarakatan Desa Kelompok Kegiatan Dusun Karet. Syaratnya adalah pendatang baru harus beragama Islam sesuai paham penduduk di dusun tersebut. Apabila pendatang baru tidak memenuhi ketentuan itu, maka ia mendapatkan sanksi berupa teguran lisan, tertulis, dan diusir dari Pendukuhan Karet. Aturan tertanggal 19 Oktober 2015, ditandatangani oleh Kepala Dusun Karet atas nama pak Iswanto dan Ketua Kelompok Kegiatan Dusun Karet atas nama Ahmad Sudarmi.⁴

Menurut seorang tokoh masyarakat Dusun Karet yang bernama Dalyanto, aturan yang ditetapkan di Pendukuhan Karet itu muncul dari masukan ketua RT, kepala dusun, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Seperti yang dikatakan oleh Dalyanto, *“Itu kebijakan wilayah, kearifan lokal. Lihatlah situasi di Aceh.”*⁵

³ Bdk. Shinta Maharani, *Pelukis di Yogyakarta Ditolak Ngontrak karena Menganut Katolik*, diunduh dari <https://nasional.tempo.co/read/1191743/pelukis-di-yogyakarta-ditolak-ngontrak-karena-menganut-katolik/full&view=ok>, pada tanggal 11 April 2019, pukul 12.51

⁴ *Ibid*

⁵ Bdk. Shinta Maharani, *Pelukis Ditolak Ngontrak di Yogyakarta, Tokoh: Kearifan Lokal*, diunduh dari <https://nasional.tempo.co/read/1191776/pelukis-ditolak-ngontrak-di-yogyakarta-tokoh-kearifan-lokal/full&view=ok>, pada tanggal 11 April 2019, pukul 12.51

Selain di Pendukuhan Karet, peristiwa kurangnya memahami pengertian toleransi juga terjadi di Kelurahan Purbayan, Kotagede, Yogyakarta. Peristiwa kurangnya rasa toleransi terlihat ketika makam Albertus Slamet Sugiardi di pemakaman Jambon, RT 53 RW 13, Kelurahan Purbayan, Kotagede, Yogyakarta batu nisannya yang berbentuk tanda salib dipotong hingga nisan itu berbentuk T.⁶

Menurut penuturan salah seorang tokoh masyarakat Kotagede Bedjo Mulyono yang mengetahui kronologi pemotongan tanda salib makam warga Katolik tersebut menjelaskan, “Awalnya saat jenazah mau dikuburkan di situ, oleh warga diperbolehkan meski beliau bukan non muslim, dengan catatan makamnya dipinggirkan.” Selain makam dipinggirkan, warga juga meminta tidak ada simbol-simbol Nasrani terpasang di pusaran Slamet. Alasannya karena kompleks pemakaman itu akan dibuat menjadi makam muslim.⁷

Namun karena dari pihak keluarga Slamet sudah terlanjur membawa simbol tanda salib untuk ditancapkan ke pusaran itu. Akhirnya, warga dan pelayat memotong tanda salib yang sudah dibawa tersebut dengan gergaji. Pemotongan salib itu atas kesepakatan warga dengan keluarga almarhum. Bedjo mengatakan bahwa kesepakatan untuk menggergaji tanda salib itu awalnya tidak tertulis. Namun karena peristiwa itu viral, pada akhirnya keluarga membuat surat

⁶ Bdk. Pribadi Wicaksono, *Heboh Nisan Tanda Salib Dipotong di Yogya, Begini Kronologinya*, diunduh dari <https://nasional.tempo.co/read/1156500/heboh-nisan-tanda-salib-dipotong-di-yogya-begini-kronologinya>, pada 11 April 2019, pukul 13.02

⁷ *Ibid*

pernyataan tertulis yang menyatakan pihak keluarga Slamet telah ikhlas untuk menghilangkan simbol Kristiani atas saran dari pengurus makam, tokoh masyarakat dan pengurus kampung. Surat pernyataan yang bermateraikan itu ditandatangani oleh istri almarhum Slamet dan Bedjo Mulyono selaku tokoh masyarakat kampung.⁸

Berdasarkan laporan Tirto.id, Penulis menemukan bahwa mantan Ketua RW setempat ini menolak jika warga disebut "intoleran". Mereka sudah cukup toleran dengan tetap memperbolehkan Slamet dimakamkan di tempat yang 99 persennya adalah orang Islam. Bejo mengatakan demikian, "*Ya monggo-lah [disebut intoleran], yang jelas kesepakatan seperti itu. Kami sebagai pelaksana, pengurus minta seperti itu ya kami ikuti saja. Saya rasa kami sudah cukup toleran*". Toleransi yang dimaksud Bejo itu menurutnya berupa bantuan warga yang menyiapkan proses pemakaman, pemandian jenazah, hingga meminjamkan ambulans untuk membawa jenazah dari RS PKU Muhammadiyah ke rumahnya. Proses pemandian dan pemakaman jenazah.⁹

Dari fenomena di atas dapat menunjukkan bahwa masyarakat masih kurang bisa memahami pengertian dari toleransi. Mereka masih memandang toleransi hanya sebatas kata-kata untuk menunjukkan dominasi. Sikap toleran yang

⁸ *Ibid*

⁹ Bdk. Dipna Videlia Putsanra, *Duduk Perkara Pemotongan Nisan Salib di Makam Purbayan Yogyakarta*, diunduh dari <https://tirto.id/duduk-perkara-pemotongan-nisan-salib-di-makam-purbayan-yogyakarta-dcea>, pada tanggal 12 April 2019, pukul 11.45

dilakukan oleh masyarakat hanya sebatas kebutuhan untuk memperoleh keuntungan saja. Kesalahpahaman akan memahami konsep toleransi dapat terlihat dari fenomena di atas yang menunjukkan adanya suatu sikap yang mengafirmasi tindakan toleransi yang dilakukan oleh masyarakat. Penulis juga memandang bahwa budaya musyawarah dan dialog yang dilakukan oleh warga Kelurahan Purbayan dengan keluarga pak Slamet masih tergolong kurang adil karena konsensus yang terjalin masih mengarah pada satu golongan tertentu. Fenomena ini terlihat pada peristiwa di mana ketua RW 13, Kelurahan Purbayan, Kotagede, Yogyakarta, menolak warganya dianggap bersikap intoleran. Seperti yang dikatakannya, "*Ya monggo-lah [disebut intoleran], yang jelas kesepakatan seperti itu. Kami sebagai pelaksana, pengurus minta seperti itu ya kami ikuti saja. Saya rasa kami sudah cukup toleran*".¹⁰ Dari pernyataan tersebut, apakah perbuatan tersebut bisa disebut toleransi?

Selain di Yogyakarta, penulis juga menemukan fenomena yang sama terjadi di Papua. Sekelompok Pesekutuan Gereja-gereja di Kabupaten Jayapura (PGGJ) menolak renovasi Masjid Agung Al-Aqsha di Sentani, Papua. Penolakan ini termuat dalam surat pernyataan yang mengatasnamakan PGGJ. Selain soal menara Masjid, PGGJ membuat tujuh poin yang harus dilaksanakan oleh Masjid tersebut, yakni toa harus diarahkan ke masjid; membatasi dakwah Islam di Jayapura;

¹⁰ Bdk. Dipna Videlia Putsanra, *Duduk Perkara Pemotongan Nisan Salib di Makam Purbayan Yogyakarta*, diunduh dari <https://tirto.id/duduk-perkara-pemotongan-nisan-salib-di-makam-purbayan-yogyakarta-dcea>, pada tanggal 12 April 2019, pukul 11.45

melarang anak sekolah memakai seragam "bernuansa agama tertentu"; melarang "ruang khusus seperti musala" pada fasilitas umum; melarang pembangunan masjid dan musala di area perumahan KPR BTN; pembangunan rumah ibadah wajib mendapatkan rekomendasi bersama PGGJ, pemerintah daerah, dan pemilik hak rakyat sesuai peraturan pemerintah; serta mendesak pemerintah provinsi dan DPR Jayapura menyusun Raperda tentang "kerukunan umat beragama" di Jayapura.¹¹

Jika dilihat dari data Badan Pusat Statistik Provinsi Papua tahun 2017, pemeluk agama Kristen Protestan maupun Katolik berjumlah 85 persen. Sementara umat Islam berjumlah 15, 12 persen dari total penduduk. Di Kabupaten Jayapura, umat Kristen berjumlah 59 persen dari total penduduk. Sedangkan umat Islam mencapai 41 persen.¹²

Menurut Ketua GP Ansor Papua dan Papua Barat Amir Madubun, sikap penolakan terhadap musola dan masjid di Papua adalah dampak dari sikap yang sama ketika sejumlah warga muslim di luar Papua menghambat kebebasan beribadah penganut agama Kristen. Saiful Islam Payage dari MUI Papua mengatakan bahwa diskriminasi terhadap umat Kristen di luar Papua menjadi salah satu faktor pendorong intoleransi di Papua. Selain itu, Jeirry Sumampouw dari PGI mengatakan bahwa sikap intoleransi di Jayapura merupakan kecenderungan

¹¹ Mufti Sholih, *Di Balik Polemik Penolakan Menara Masjid di Papua*, diunduh dari <https://tirto.id/di-balik-polemik-penolakan-menara-masjid-di-papua-cGrd>, pada tanggal 8 Juni 2019, pukul 16.08

¹² *Ibid*

masyarakat menonjolkan mayoritas dan minoritas agama dalam perkara menyelesaikan kebebasan beribadah di Indonesia.¹³

Dari fenomena di atas, jika dilihat dari sudut pandang pemikiran seorang filsuf Mazhab Frankfurt yang bernama Herbert Marcuse dalam karyanya yang berjudul *Repressive Tolerance*, maka Marcuse melihat bahwa kesetaraan toleransi dalam masyarakat industri maju semakin abstrak dan palsu. Toleransi yang ditunjukkan oleh mereka adalah tipuan. Masyarakat terkondisikan menjadi seorang yang tertutup terhadap perubahan.¹⁴

Penulis melihat fenomena di atas selaras dengan ide Marcuse mengenai toleransi. Fenomena-fenomena tersebut menunjukkan bahwa toleransi justru menjadi sarana sublimasi masyarakat mayoritas dalam menindas sesamanya yang minoritas. Misalnya dalam kasus yang terjadi di Kelurahan Purbayan, Kotagede. Penyalur hasrat kekuasaan tersebut terlihat dalam aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pihak setempat. Dalam aturan yang ditetapkan hierarkis masyarakat mayoritas yang melarang adanya simbol-simbol Nasrani di makam menunjukkan suatu bentuk represif toleransi yang semakin mempermudah terjadinya penindasan dan juga sebagai alat penguasa untuk memperluas kekuasaan. Dengan demikian, toleransi yang dilakukan warga Kelurahan Purbayan bersifat palsu, sebab toleransi yang dilakukan oleh warga Kelurahan Purbayan telah

¹³ *Ibid*

¹⁴ Bdk. Herbert Marcuse, 'Repressive Tolerance', dalam buku *A Critique of Pure Tolerance*, Amerika: Beacon Press, 1965, hlm 16-17

mengkondisikan masyarakat minoritas untuk tidak dapat mengadakan pellawanan. Hal ini terjadi karena aturan yang diberlakukan oleh kaum mayoritas terhadap kaum minoritas bersifat menahan kaum minoritas untuk memberontak.

Apakah benar demikian toleransi dipandang sebagai alat untuk menindas? Dari pandangan tersebut, penulis melihat ada suatu kesalahan dalam memandang arti dari toleransi. Penulis melihat bahwa kritik Marcuse terhadap toleransi tersebut, membuat konsep toleransi seolah-olah hanya merupakan bagian dari ekspresi kekuasaan untuk menindas.

Jikalau demikian ada kesalahan dalam memandang arti toleransi, apa itu toleransi? Secara etimologi toleransi berasal dari bahasa Latin, *tolerare* yang berarti “menanggung atau menahan”. Menanggung dalam hal ini memiliki suatu makna menanggung sesuatu yang berat.¹⁵ Selain itu, penulis juga menemukan term-term yang lain dari kata toleransi. Term ini dari bahasa Inggris, yakni *toleration*, *tolerant*, dan *tolerance*. Berdasarkan *Oxford Dictionary*, kata *toleration* diartikan sebagai suatu kehendak untuk memperbolehkan yang kamu tidak sukai atau setuju dengan yang terjadi atau selanjutnya.¹⁶ *Toleration* diartikan sebagai ‘pen-tolerasi-an’. Dengan kata ini, kata *toleration* ingin menunjukkan adanya suatu proses, cara atau perbuatan yang mengarah pada mentoleransi. Sedangkan dalam kamus bahasa

¹⁵ Bdk. Kelly James Clark, “Panggilan Anak-Anak Abraham”, dalam Kelly James Clark (ed.), *Anak-Anak Abraham – kebebasan dan Toleransi di Abad Konflik Agama*, (judul asli: *Abraham’s Children, Liberty and Tolerance in an Ages of Religion Conflict*), diterjemahkan oleh Indro Suprobo dan Listia, Yogyakarta: PT Kanisius, 2014, hlm. 16.

¹⁶ “a willingness to allow something that you do not like or agree with to happen or continue”, Bdk. *Oxford Advanced Learner’s Dictionary*, New York: Oxford University Press, 2005, hlm 1615

Inggris, kata *tolerant* memiliki arti bersikap toleran.¹⁷ Dengan demikian, *tolerant* memiliki arti mengambil suatu sikap untuk toleran¹⁸. Term terakhir, yakni *tolerance* memiliki arti toleransi.¹⁹ Menurut Kelly James Clark, toleransi sebagai suatu sikap untuk menanggung atau menahan kepercayaan yang ada dalam masyarakat yang bagi seseorang yang lain dianggap salah dan buruk. Dalam toleransi, orang memandang keyakinan dan praktek seseorang yang berbeda sebagai hal yang kurang bernilai tanpa mengurangi nilai orang yang memeluknya. Toleransi adalah sebuah sikap pribadi untuk menundukan kecenderungan alamiah manusia untuk mengambil jarak dan menolak konflik dengan keyakinan dan praktek orang lain. Pribadi toleran lebih menghormati subjek lain.²⁰

Setelah mencoba menelusuri pengertian dari toleransi secara etimologi, penulis tertarik dengan seorang filsuf Mahzab Frankfurt generasi ke empat yang membahas tentang toleransi. Filsuf tersebut bernama Rainer Forst. Rainer Forst dalam mengkaji konsep toleransi dalam bukunya *Toleration in Conflict* menggunakan term *toleration*. Hal ini penulis melihat tujuan Rainer Forst menggunakan term tersebut untuk menunjukkan bahwa toleransi sebagai suatu cara, proses, dan perbuatan yang hadir dalam suatu konflik. Bagi Rainer Forst

¹⁷ Bdk. John M. Echols, Hassan Shadily, *Kamus Inggris – Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006, hlm 595

¹⁸ Berdasarkan KBBI, toleran memiliki arti bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dsb) yang berbeda atau bertentangan dng pendirian sendiri. Bdk. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2012, hlm 1477

¹⁹ John M. Echols, Hassan Shadily, *Op. Cit.*, hlm 595

²⁰ Kelly James Clark, *Op. Cit.*, hlm 16

toleransi adalah suatu sikap koeksistensi atau penghindaran konflik antar individu manusia.²¹ Toleransi tidak muncul dari luar melainkan muncul dari dalam konflik sehingga toleransi selalu berkaitan dengan konteks sosial. Toleransi juga berkaitan dengan pihak-pihak berkepentingan dan memungkinkan timbul suatu tindakan timbal balik antar pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, sejarah dan kehadiran toleransi selalu berkaitan dengan situasi perjuangan kelas.²² Rainer Forst sadar bahwa terdapat kontroversi dan ketidaksepakatan dalam memandang arti dari toleransi. Bahkan toleransi sering dipandang negatif karena berkaitan dengan kuasa.²³

Menurut Rainer Forst dalam melihat konsep toleransi, seseorang perlu melihat tingkatan dari toleransi itu sendiri. Tingkatan toleransi tersebut dapat dilihat dari bentuk konsepsi dari toleransi. Apa itu konsepsi? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konsepsi memiliki arti sebagai suatu rancangan yang ada dalam pikiran.²⁴ Sedangkan menurut Rainer Forst sendiri, konsepsi adalah interpretasi spesifik dari elemen-elemen yang terkandung dalam konsep²⁵ Rainer Forst menyebutkan terdapat empat konsepsi dalam toleransi, yakni *permission conception*, *Coexistence Conception*, *Respect Conception*, dan *Esteem Conception*.

²¹ Bdk. Rainer Forst, *Toleration in Conflict*, (Judul asli: *Toleranz im Konflikt: Geschichte, Gehalt und Gegenwart eines umstrittenen Begriffs*), diterjemahkan oleh Ciaran Cronin, New York: Cambridge University Press, 2013, hlm.hal 1

²² “*toleration is not situated above or beyond social disputes but emerges within them, so that its concrete shape is always tied to a particular social and historical context...*” *Ibid.*, hlm. 2

²³ *Ibid.*, hlm. 2-3

²⁴ Bdk. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2012, hlm 725

²⁵ *Ibid.*, hlm 17

Dalam setiap bagian konsepsi tersebut terdapat ukuran yang menentukan jenis kualitas toleransi.

Berangkat dari permasalahan tentang kesalahpahaman pandangan akan bentuk toleransi, maka penulis tertarik untuk membahas pemikiran Rainer Forst tentang empat konsepsi toleransi. Urgensi penulis mengambil pemikiran Rainer Forst ini adalah pertama, permasalahan dalam membangun rasa toleransi yang masih kurang di Indonesia. Bahkan toleransi sering disalahartikan sebagai bentuk penghormatan yang semata-mata untuk tujuan pribadi. Hal ini dapat dilihat dari fenomena pemotongan nisan, pengusiran warga beda agama dan berbagai fenomena lain yang menunjukkan bahwa pemahaman mengenai toleransi masih terbatas pada pemahaman dominatif. Toleransi dipahami sebagai semacam 'izin' yang diberikan oleh kelompok masyarakat yang lebih berkuasa atau mendominasi kepada kelompok yang terdominasi. Dalam hal ini, dominasi ditunjukkan melalui status sebagai status mayoritas berhadapan dengan status minoritas agama. Oleh sebab itulah, tujuan penulis mengambil teori empat konsepsi Rainer Forst ini adalah memberikan suatu gambaran akan tingkatan kualitas toleransi, dan penulis hendak ingin memberikan suatu gambaran tentang bentuk toleransi yang benar-benar menghormati akan martabat kemanusiaan.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, penulis dapat merumuskan sebuah pertanyaan yang akan menjadi dasar dari penulisan skripsi ini. Pertanyaan tersebut adalah “Apa itu toleransi menurut Rainer Forst dalam buku *Toleration in Conflict?*” Untuk memahami toleransi secara lebih mendalam, penulis akan membatasi pembahasan dengan secara khusus akan membahas mengenai empat konsepsi toleransi Rainer Forst.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk memenuhi kelulusan Strata Satu (S1) Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dan untuk mengetahui dan memahami empat konsepsi toleransi menurut Rainer Forst dalam buku *Toleration in Conflict*.

1.4. Metode Penelitian

a. Sumber Data

Jenis data yang akan digunakan oleh penulis dalam pengerjaan skripsi kali ini adalah penelitian kualitatif. Metode untuk memperoleh data penelitian ialah dengan studi pustaka, yakni mengenai konsepsi toleransi menurut Rainer Forst dalam buku *Toleration in Conflict* sebagai sumber primer dan didukung dengan sumber sekunder lainnya.

b. Jenis Penelitian dan Metode Analisis Data

Untuk penelitian kali ini, penulis akan menggunakan jenis penelitian yang menyelami unsur-unsur historis dalam pemikiran Rainer Forst. Penulis akan mempelajari pemikiran Rainer Forst tentang konsep toleransi dalam bukunya yang berjudul *Toleration in Conflict*. Penulis akan menggunakan metode interpretasi hermeneutika secara umum.

1.5. Tinjauan Pustaka

Dalam bukunya *The Struggle for Recognition* ini, Axel Honneth ingin membahas tentang peranan rekognisi dalam melawan kekerasan yang dilakukan terhadap orang-orang yang mengklaim identitas. Axel Honneth melihat pentingnya rekognisi dalam melawan orang-orang yang dianggap tidak adil. Ketidakadilan ini terlihat dalam pengakuan sosial di dalam dunia kehidupan yang dianggap sebagai ketidakadilan moral. Ketidakadilan moral dapat dilihat dalam kehidupan dunia sosial atau *labenswelt*. Dalam pemikirannya, Axel Honneth dipengaruhi oleh Hegel dalam mengkaitkan moralitas dengan sentimen-sentimen moral rakyat dan menunjukkan cara bahwa perasaan-perasaan kurangnya pengakuan dapat menimbulkan tindakan sosial dan konflik sosial. Axel Honneth melihat bahwa rekognisi menentukan dalam proses pembangunan identitas yang bergantung pada

tanggapan orang lain terhadapnya.²⁶ Axel Honnet merupakan salah satu filsuf Mazhab Frankfurt yang mempengaruhi Rainer Forst. Rainer Forst mengkritik pemikiran Axel Honneth tentang sistem *recognition*. Menurut Rainer Forst dalam tindakan komunikasi tidak hanya *recognition* (pengakuan), melainkan juga ada suatu tindakan toleransi.

Selain Axel Honneth, Rainer Forst juga mengkritik pemikiran Herbert Marcuse tentang Represif Toleransi. Dalam bukunya *A Critique Of Pure Tolerance* ini, Marcuse membahas gagasan toleransi dalam masyarakat industri maju. Kesimpulan yang dicapai adalah bahwa realisasi tujuan toleransi akan membutuhkan intoleransi menuju kebijakan yang berlaku, sikap, pendapat, dan perluasan toleransi terhadap kebijakan, sikap, dan pendapat yang dilarang atau ditekan. Apa yang hari ini diproklamirkan dan dipraktikkan sebagai toleransi, dalam banyak manifestasinya yang paling efektif melayani penyebab penindasan.²⁷ Pandang Herbert Marcuse ini mempertajam pemikiran Rainer Forst tentang konsep toleransi.

Dalam buku terakhir ini, yang berjudul *The Power of Toleration*, membahas tentang debat antara Rainer Forst dengan Wendy Brown. Wendy Brown merupakan seorang profesor ilmu politik Emanuel Heller di Universitas California, dan Rainer Forst merupakan profesor teori dan filsafat politik di Johann Wolfgang Goethe

²⁶ Bdk. Axel Honneth, *The Struggle for Recognition: the moral grammar of social conflicts*, (Judul asli: *Kampf um Anerkennung*), diterjemahkan oleh Joel Anderson, Cambridge: The MIT Press, 1995, hlm. x-xxi

²⁷ Bdk. Herbert Marcuse, 'Repressive Tolerance', dalam buku *A Critique of Pure Tolerance*, Amerika: Beacon Press, 1965, hlm 81

University di Frankfurt serta co-director dari Penelitian Pembentukan Cluster Perintah Normatif. Dari sudut pandang Wendy Brown, memandang toleransi sebagai bentuk instrumen pemerintahan liberal dan wacana kekuasaan yang melegitimasi supremasi Barat dan kekerasan negara kulit putih. Sedangkan bagi Reiner Forst, toleransi adalah sebagai fenomena yang menunjukkan konflik sosio historis dan menyarankan bentuk-bentuk spesifik resolusi konflik yang dapat memperkuat serta menurunkan hierarki dan ketidaksetaraan sosial. Bagi keduanya toleransi adalah fenomena diskursif yang terwujud dalam praktik sosial dan teknologi politik, sebuah fenomena yang secara geopolitik dan budaya spesifik, yang mengalami perubahan historis, dan dengan demikian juga mengarah ke konflik tentang konsep toleransi itu sendiri.²⁸ Dalam buku inilah, Rainer Forst menunjukkan pemikirannya tentang konsep toleransi dan kritiknya terhadap pemikiran Herbert Marcuse.

Sedangkan dalam buku *Contexts of Justice*, Rainer Forst membahas konteks keadilan dalam sudut pandang liberalisme dan komunitarianisme. Dalam hal ini, Rainer Forst berusaha melihat konteks keadilan dalam sudut pandang hukum, etika hukum kodrat, ethos demokrasi, keadilan dalam sudut pandang universal dan wujud konkret dari keadilan. Rainer Forst mengkaitkan konteks keadilan dengan kebaikan

²⁸ Bdk. luca Di Blasi and christoph f. e. Holzhey (ed.), *The Power of Toleration - a Debate Wendy Brown and Rainer Forst*, New York: Columbia university Press, 1893, hlm 9-10

(*the good*); mengkaitkan dengan konteks justifikasi; dan mengkaitkan dengan konteks rekognisi.²⁹

Selain itu, penulis juga menemukan sumber lain yang berjudul *Justification And Critique*. Dalam buku ini, Rainer Forst menjelaskan pentingnya konsep toleransi dalam diskursus politik kontemporer dalam mempertanyakan tentang pentoleransian dari kebudayaan dan agama minoritas di bawah suatu negara yang dikatakan sebagai perselisihan peradaban dunia.³⁰

Sedangkan buku utama yang digunakan oleh penulis dalam membahas konsepsi toleransi adalah *Toleration in Conflict*. Dalam buku ini, Rainer Forst membagi toleransi menjadi 4 konsepsi, yakni *permission conception*, *Coexistence Conception*, *Respect Conception*, dan *Esteem Conception*. Untuk konsepsi pertama, *Permission Conception* menjelaskan bentuk toleransi yang di dalamnya terdapat otoritas dan minoritas yang menyesuaikan diri pada perbedaan mereka dan menahan diri untuk mengintervensi ketika minoritas dipaksa untuk menerima kekuatan otoritas. Dalam hal ini, toleransi dipahami sebagai *permissio mali* atau praktik yang dianggap tidak layak, yang oleh Rainer Forst dikatakan sebagai toleransi sebagai penghinaan.³¹ Konsepsi kedua adalah *Coexistence Conception*. Konsepsi tersebut mengartikan toleransi sebagai usaha untuk menghindari konflik

²⁹ Bdk. Rainer Forst, *Contexts Of Justice*, (judul asli: *Kontexte der Gerechtigkeit*), diterjemahkan oleh John M.M. Farrell, California: University of California Press, hlm 1-5.

³⁰ Bdk. Rainer Forst, *justification and Critique*, (judul asli: *Kritik der Rechtfertigungsverhältnisse*), diterjemahkan oleh Ciaran Cronin, USA: Polity Press, 2014, hlm 126

³¹ Bdk. Rainer Forst, *Toleration in Conflict: Past and Present* (Judul asli: *Toleranz im Konflikt: Geschichte, Gehalt und Gegenwart eines umstrittenen Begriffs*), diterjemahkan oleh Ciaran Cronin, New York: Cambridge University Press, 2013, hlm 27.

dan mengejar tujuannya sendiri dan tidak bersandar pada nilai yang kuat.³² Konsepsi toleransi yang ketiga adalah *Respect Conception*. Menurut Forst, konsepsi yang ketika ini menghasilkan bentuk pendasaran respek secara moral pada individu atau kelompok yang melakukan toleransi.³³ Konsepsi ke empat yakni *Esteem Conception*. Konsepsi toleransi ini memiliki arti tidak hanya menghargai anggota masyarakat dari budaya yang berbeda atau komunitas religius sebagai hukum dan kesetaraan politis, tetapi menghargai keyakinan dan praktik hidup mereka yang secara etis sungguh bernilai.³⁴

1.6. Skema Penulisan

Pada skripsi yang berjudul “Konsep Toleransi Menurut Rainer Forst dalam Buku *Toleration In Conflict* penulis akan menggunakan skema penulisan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penulisan, tinjauan pustaka, dan skema penulisan

³² *Ibid*, hlm 28

³³ *Ibid*, hlm 29-30

³⁴ *Ibid*, hlm 31.

Bab II: Latar Belakang Pemikiran

Bab ini berisi biografi Rainer Forst, karya-karya pemikiran, tokoh yang mempengaruhi, dan kekhasan teori kritis Rainer Forst.

Bab III: Konsep Toleransi dalam Buku *Toleration In Conflict*

Bab ini berisi penelitian penulis terkait konsep toleransi menurut Rainer Forst dalam buku *Toleration in Conflict*, terutama dalam sub-bab *Toleration: Concept and Conceptions*.

Bab IV: Tinjauan Kritis dan Relevansi

Bab ini berisi tentang tinjauan kritis dan relevansi dari keseluruhan gagasan dalam skripsi.

Bab V: Penutup

Pada bagian penutup ini, penulis akan memberikan kesimpulan dari keseluruhan hasil pembahasan dalam skripsi dan saran-saran yang dapat membangun perkembangan Fakultas Filsafat.